PANCASILA

ADALAH KEMANDIRIAN
SISTEM BERBANGSA DAN BERNEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PANCASILA BERDAULAT
BANGSA SELAMAT

PANCASILA BERDAULAT BANGSA SELAMAT

EDISI KE LIMA

TATA BERBANGSA PANCASILA

dan TATA BERNEGARA PANCASILA

IKRAR KEBANGSAAN

AKU BERSUMPAH DEMI NEGERI INI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Kami Bangsa Indonesia,
Ber-KeTuhanan Yang Maha Esa

2. Kami Bangsa Indonesia,
Ber-Kemanusiaaan Yang Adil Dan Beradab

3. Kami Bangsa Indonesia,
Menjunjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan Indonesia

4. Kami Bangsa Indonesia,
Ber-Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

5. Kami Bangsa Indonesia,
Ber-Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Laksamana TNI (Pur) Slamet Soebijanto | Pemimpin MKPN

PANCASILA BERDAULAT BANGSA SELAMAT

PANCASILA ADALAH SISTEM MAJELIS

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri dari

1. Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa
   adalah wujud tegak dan berdaulatnya kebenaran atas dasar kebenaran Agama yang diakui di Indonesia

2. Majelis Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
   adalah wujud tegak dan berdaulatnya kebenaran atas dasar keberhasilan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3. Majelis Persatuan Indonesia
   adalah wujud tegak dan berdaulatnya kebenaran atas dasar kebenaran Ideologi Kebangsaan Indonesia

4. Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
   adalah wujud tegak dan berdaulatnya kebenaran atas dasar kebenaran Etika, Estetika dan Budaya bangsa Indonesia

5. Majelis Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
   adalah wujud tegak dan berdaulatnya kebenaran atas dasar kebenaran Potensi dan Profesi Bangsa Indonesia

Buku ini kami persembahkan bagi bangsa dan negeri,
tempat kami hidup dan berkehidupan
demi tegak, utuh dan berdaulatnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyusun :

Majelis Kebangsaan Panji Nusantara

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Skema Tata Berbangsa dan Bernegara Pancasila

BAB I
Pendahuluan 3

BAB II
Pancasila sebagai tata berbangsa dan tata bernegara 8

1. Dasar Pemikiran
   a. Posisi Geografis Indonesia
   b. Perjalanan Sejarah Bangsa
   c. Azas Bangsa
   d. Sifat Bangsa
   e. Jatidiri Bangsa
2. Pemangku Amanah Bangsa
3. Pancasila sebagai tata berbangsa
4. Pancasila sebagai tata bernegara

BAB III
Nilai-nilai Dasar Berbangsa dan Bernegara 21

1. Sumpah Pemuda
2. Proklamasi
3. Dasar Kemerdekaan Bangsa Indonesia
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Ikrar Bangsa Indonesia

BAB IV
Undang-undang Dasar Bangsa 26

BAB V
Penutup 31

Lampiran 1 : Pancasila milik Bangsa-Bangsa, Demokrasi milik Penguasa
Lampiran 2 : Perbedaan Azas Pancasila dan Azas Demokrasi
Lintasan Perjalanan MKPN

KATA PENGANTAR

Menyikapi keadaan bangsa dan negara yang sedang dalam keadaan carut marut, karena intervensi sistematis asing dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan, maka kami sekelompok anak bangsa yang resah dan gerah dengan keadaan tersebut, berhimpun dalam Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara (MKPN). MKPN bukan organisasi politik, tidak terkait dengan partai politik dan tidak akan pernah menjadi partai politik, merasa terpanggil dan perlu mengajak setiap anak bangsa untuk turut serta berjuang memperbaiki kondisi bangsa dan negara yang carut narut dan porak poranda, agar berdaulat kembali sebagai bangsa dan negara yang bermartabat, disegani dan dihormati, dengan cara menegakkan Pancasila agar Tegak dan Berdaulat, sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan ideologi negara, sebagai azas, sifat, dan jatidiri bangsa, dan sebagai sumber hukum dari segala hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila menjadi kemandirian Sistim Berbangsa dan Sistim Bernegara Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila adalah nilai-nilai dan budaya luhur bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran agama-agama yang ada di Nusantara, bersifat tetap, pasti, tidak berubah dan dapat diterima oleh setiap bangsa, dan hanya Sistim Pancasila dengan sistim Majelis-nya, (bukan Sistim Partai), yang dapat mengangkat harkat-martabat kaum-kaum Agamawan, Cerdik-Cendikia, TNI dan Bala Cadangan, para Sultan/Raja/Pemangku Adat, Profesional dan seluruh Rakyat Indonesia, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain didunia. Pancasila adalah konsep murni bangsa Indonesia yang dipersembahkan untuk dunia, konseptata (sistim) berbangsa dan tata (sistim) bernegara yang bisa membawa kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran dunia.

Untuk itu, MKPN sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan saat ini, telah melakukan kegiatan sosialisasi dan dialog dengan para tokoh agama, para cerdik cendikia, TNI, para Raja/Sultan/Pemangku Adat dan para pemuda dan mahasiswa sebagai uji material konsep Tata(Sistim) Berbangsa dan Tata(Sistim) Bernegara Pancasila, diseluruh wilayah Nusantara, lebih dari 370 tempat telah disinggahi, mulai dari ujung timur Papua sampai ujung barat P. Sumatra.

Buku dengan judul: " Pancasila Berdaulat, Bangsa Selamat ", edisi ke-empat ini, dengan sub- judul Tata (Sistim) Berbangsa dan Tata (Sistim) Bernegara Pancasila merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya, dimaksudkan mengingatkan dan menekankan kembali bahwa Pancasila adalah kemandirian sistim berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada nilai-nilai dan budaya luhur bangsa sendiri, untuk dijadikan pedoman bagi setiap anak bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan setiap anak bangsa mengerti dan memahami dengan penuh keyakinan terhadap Pancasila sebagai kemandirian sistim berbangsa dan bernegara, yang melahirkan sinergisitas kemandirian dibidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan negara, yang akan mengangkat kemandirian sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dan bermartabat dimata dunia.

Semoga Allah SWT memberi rahmat, hidayah dan ridhoNya kepada seluruh rakyat Indonesia terhadap segala daya dan upaya yang dilakukan untuk menegakkan Pancasila, agar Pancasila Berdaulat, Bangsa Selamat di bumi Nusantara.

Jakarta, 2 Mei 2014

Majelis Kebangsaan Panji Nusantara

Laksamana TNI (Pur) Slamet Soebijanto
Pemimpin

Skema
TATA BERBANGSA dan BERNEGARA PANCASILA

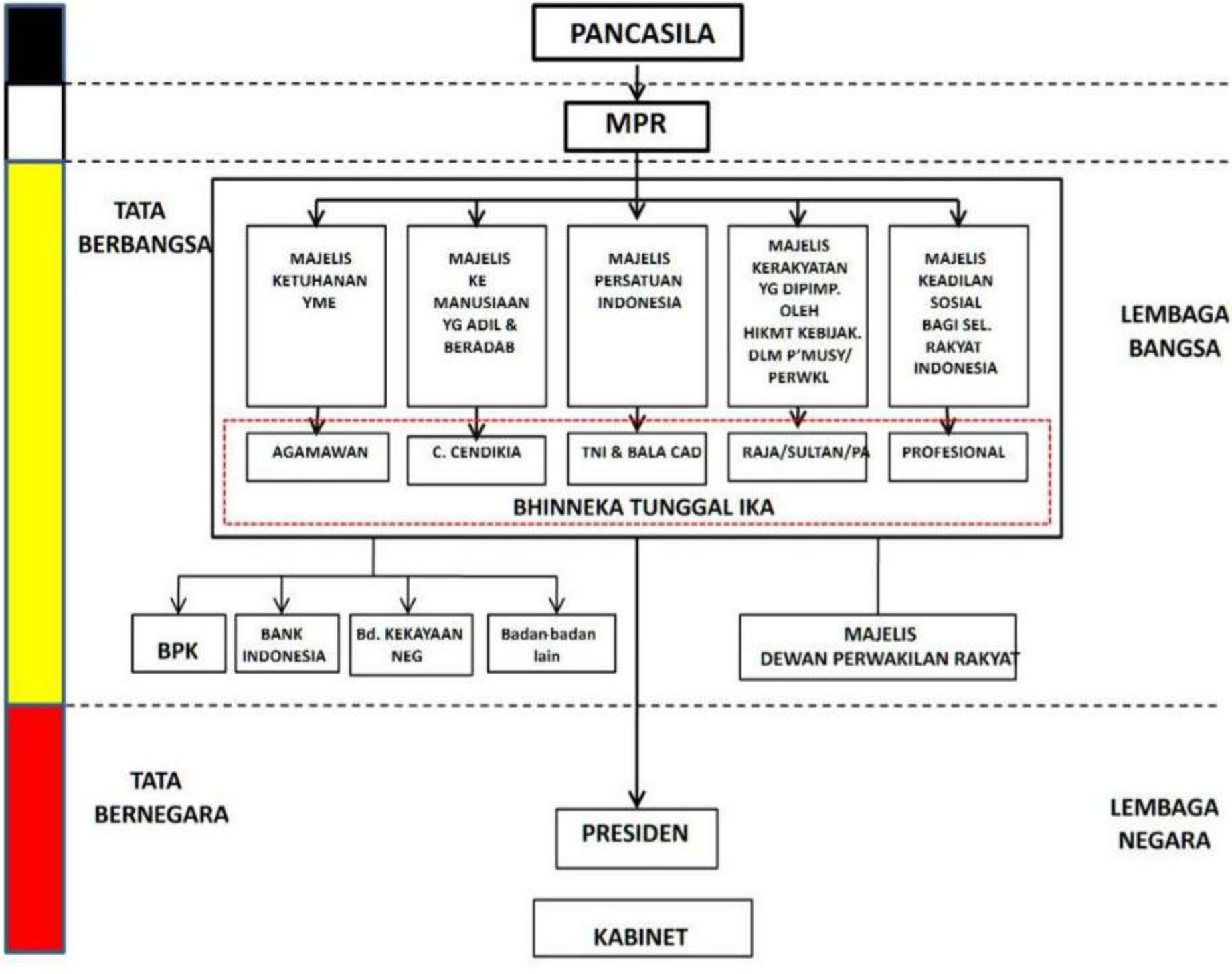

BAB I

PENDAHULUAN

Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara pasca reformasi tahun 1998, tidak semakin baik justru semakin tidak jelas dan mengarah kearah perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sebagai akibat dipaksakan sistim demokrasi yang berasal dari Yunani, berlandaskan persaingan menggantikan sistim musyawarah yang berlandaskan kasih sayang yang telah menjadi budaya dan peradaban rakyat Nusantara. Sebagai akibatnya masyarakat Nusantara yang semula selalu rukun, damai, welas asih, suka tolong menolong, selalu bergotong royong dan menjaga tali silahturami. telah berubah menjadi masyarakat yang individualis dan egois, mementingkan diri sendiri. Hubungan harmonis yang pernah ada dalam kehidupan masyarakat, telah berubah menjadi disharmonis, dan sudah menjurus kearah SARA (suku, agama, ras) yang membahayakan terhadap keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan sistim demokrasi, telah terbukti bahwa pada setiap pemilihan Kepala Daerah tidak pernah melahirkan ketenangan dan kedamaian. Pihak yang kalah dalam pemilihan, tidak mau menerima kekalahannya, melakukan protes dan muara akhir dari kekecewaannya, melampiaskan kekesalan hatinya dengan melakukan tindakan anarkis, merusak dan membakar gedung-gedung dan fasilitas milik pemerintah. Dengan sistim demokrasi, KKN tumbuh subur, korupsi merajalela mulai dari tingkat bahwa sampai tingkat atas, jurang kemiskinan semakin dalam dan lebar, lingkungan hancur diekspoitasi secara besar-besaran tanpa mempedulikan dampak lingkungan. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, benar-benar mengkhawatirkan dan sudah berada pada titik nadir, perlu penyelamatan segera.

Berangkat dari situasi kondisi tersebut, MKPN yang merupakan wadah tempat berhimpunnya anak bangsa, merasa prihatin dan resah, ikut bertanggung jawab dan berkewajiban mencari solusi terhadap situasi dan kondisi negara dan bangsa saat ini. Langkah nyata yang dilakukan MKPN, menganalisa situasi dan kondisi nasional saat ini, dan berkesimpulan bahwa akar permasalahan yang mendasar bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan arah, karena telah meninggalkan

sejarah perjuangan bangsanya sendiri, meninggalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan idiologi negara. Sebagai tindak lanjut, Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara memutuskan melakukan perjalanan panjang keseluruh wilayah Nusantara, untuk mengingatkan kembali kepada setiap komponen anak bangsa, tentang pentingnya " Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup, falsafah dan ideologi negara, sekaligus azas, sifat dan jatidiri bangsa ",. Oleh karena itu, MKPN mengajak dan menyeru kepada seluruh anak bangsa untuk kembali pada Pancasila dan melakukan langkah-langkah penyelamatan segera dan sudah tiba saatnya bagi semua anak bangsa yang masih cinta pada negeri ini untuk segera melepaskan baju-baju kepentingan dan mengganti dengan baju-baju pengabdian untuk mengatasi masalah bangsa yang telah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adalah fakta dan sudah terbukti bahwa sistim demokrasi telah membuat anak bangsa menjadi materialitis/sekuler; sudah terbukti bahwa sistim demokrasi telah membuat tali silaturahmi anak bangsa terputus, terpecah belah dan cerai berai; sudah terbukti bahwa sistim demokrasi telah membuat anak bangsa menjadi individualistis dan hilang rasa kekeluargaannya; sudah terbukti bahwa sistim demokrasi telah membuat nilai-nilai budaya bangsa hancur berantakan, sudah terbukti bahwa demokrasi telah membuat bangsa ini menjadi bangsa yang tidak beradab. Dengan demikian semakin jelas bahwa sesungguhnya sistim demokrasi adalah sistim gayabaru politik adu domba, memecah belah bangsa. Perpecahan yang terjadi di Indonesia memang sangat diharapkan oleh Negara-negara yang berkepentingan terhadap Indonesia, karena dengan perpecahan maka Indonesia akan sangat mudah dikendalikan dan diarahkan. Dengan posisi geografis sebagai pintu dunia, jumlah penduduk yang besar dan kaya akan sumberdaya alam, Indonesia berpotensi menjadi negara besar dan kuat yang mampu mempengaruhi dan mengganggu pengendalian kepentingan mereka dikawasan Asia.

"TATA BERBANGSA PANCASILA DAN TATA BERNEGARA PANCASILA", menjelaskan, menegaskan dan mengingatkan kepada seluruh anak bangsa bahwa "Pancasila adalah kemandirian sistim berbangsa dan bernegara yang dirancang bangun untuk bangsa Indonesia dan bahkan dapat digunakan untuk dunia".

Pancasila bertolak pada nilai-nilai luhur dan budaya luhur bangsa, budaya Nusantara, karena Bangsa Indonesia adalah bangsa yang adat istiadat, kebiasaan dan tata lakunya berlandaskan agama, sehingga norma kehidupannya selalu berupaya berkeadilan dan berkeadaban, kaidah yang dipegang dalam kehidupannya, selalu berupaya menjaga dan mempertahankan tali silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan, filosofi kehidupannya mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan segala persoalan, muaranya yang hendak diraih adalah keadilan atas dasar kebenaran berazaskan Pancasila.(lihat lampiran 1)

Pancasila adalah nilai kebenaran bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila yang bersifat tetap, pasti, tidak berubah dan dapat diterima oleh semua golongan, baik dari golongan suku, agama, dan ras di Indonesia. Pancasila adalah lintasan sejarah, budaya, sifat, jatidiri bangsa Indonesia yang kemudian menjadi azas bangsa Indonesia yang mengacu pada kebenaran agama-agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah dasar negara, alat pemersatu bangsa sekaligus koridor dan regulator dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah tujuan berbangsa yang bersifat abadi, karena Pancasila mengharuskan setiap anak bangsa beragama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, Pancasila mengharuskan setiap anak bangsa berkeadilan dan berkeadaban, Pancasila mengharuskan setiap anak bangsa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, Pancasila mengharuskan setiap anak bangsa bermusyawarah dalam memecahkan setiap permasalahan bangsa, Pancasila bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dirumuskan tujuan bernegara yang harus dicapai seperti yang tertuang pada alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, sila-sila dalam Pancasila adalah alat ukur, alat uji dan klarifikasi yang harus digunakan dalam sistim berbangsa dan sistim bernegara yang bertolak atas dasar kebenaran agama. Pancasila menganut sistim majelis, tidak menganut sistim partai, dan Lembaga Kedaulatan Bangsa Indonesia adalah

Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang diisi oleh wakil-wakil rakyat yang berhak, atas dasar Pancasila.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berazaskan Pancasila, bukan berazaskan demokrasi. Demokrasi bukan peradaban bangsa Indonesia dan bahkan bukan pula peradaban bangsa-bangsa Asia-Afrika dan dalam prakteknya, telah menghancurkan tiga hal dasar dalam kehidupan manusia, yaitu : menghancurkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, menghancurkan keharmonisan hubungan manusia dengan manusia, menghancurkan keharmonisan hubungan manusia dengan alam/lingkungan. Dengan demikian sebenarnya demokrasi adalah penghacur peradaban manusia.

Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Asia-Afrika adalah bangsa yang adat istiadatnya, kebiasaannya dan tatalaku kehidupannya berlandaskan agama, sehingga sangat berbeda sekali dengan negara-negara yang menganut paham demokrasi. Oleh karena itu, Pancasila harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan oleh setiap anak bangsa, Pancasila harus tegak dan berdaulat di bumi Nusantara, karena Pancasila adalah darahnya ibu pertiwi, darahnya rakyat Indonesia, darahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hanya Pancasila yang dapat "mengangkat harkat dan martabat" para Agamawan, para Cerdik Cendikia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bala cadangan (Polri dan Rakyat terlatih), para Sultan/Raja dan Pemangku Adat, para Profesional dan seluruh Rakyat Indonesia.

Perjalanan panjang keliling Indonesia, sejak 17 Desember 2010 setelah ikrar pertama kali dikumandangkan di gedung University Club, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hingga saat ini, lebih dari 370 kota telah disinggahi, baik yang berulang maupun sekali, mulai ujung timur kota Jayapura/Papua sampai ujung barat kota Banda Aceh/P.Sumatra. MKPN melakukan diskusi dan tanya jawab tentang Sejarah Perjalanan Bangsa dan Pancasila, dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, kaum intelektual kampus dan pemerintahan, TNI, para Raja, para Sultan dan para Pemangku adat, kaum profesional, pemuda dan mahasiswa.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kampus-kampus, di Korem, di Gedung Pertemuan, di Gedung Joang, di Mesjid-masjid, di Pesantren, di Gereja dan dilapangan terbuka. MKPN mengingatkan, menyadarkan dan mengajak kepada anak bangsa untuk kembali ke Pancasila dan ber-IKRAR untuk negeri ini. Mengingatkan bahwa Pancasila adalah azas, sifat dan jatidiri bangsa Indonesia yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan budaya luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah darahnya ibu pertiwi, darahnya rakyat Indonesia, darahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga uraian singkat Tata Berbangsa dan Bernegara berdasarkan Pancasila, semakin menyatukan kita kembali kita sebagai anak bangsa yang mencintai negeri ini dan juga semakin menyakinkan kita bahwa Pancasila adalah kebenaran bagi bangsa Indonesia, harus tegak dan berdaulat agar bangsa Indonesia selamat dari perpecahan. Pancasila harus menjadi koridor dan regulator dalam tata berbangsa dan tata bernegara.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

BAB II

PANCASILA SEBAGAI TATA BERBANGSA DAN TATA BERNEGARA

1. DASAR PEMIKIRAN

a. POSISI GEOGRAFIS INDONESIA

Posisi geografi Negara Kesatuan Republlik Indonesia terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta dilewati oleh empat jalur laut utama dunia menjadikan Indonesia sebagai pintu dunia yang sangat penting dan sangat strategis, menghubungkan negara-negara yang berada di sekitar kawasan Samudra Pasifik dan negara-negara yang berada di sekitar kawasan Samudra Hindia dan Benua Eropa. Pada sisi lain Indonesia juga terletak tepat pada sabuk khatulistiwa, mulai dari 95 ^{0} B.T-141$_{0}$ B.T dan diantara 6$_{0}$ L.S dan 6 $_{0}$ L.U, pada kawasan pusat mineral dunia Posisi strategis, sumberdaya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar dan keragaman budaya dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki merupakan potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang menjadi negara yang kuat, disegani dan bahkan ditakuti dunia.

Potensi dan posisi strategis yang dimiliki Indonesia sangat menjadi perhatian dunia, dan sangat tidak dikehendaki Indonesia mengembangkan diri, karena akan sangat mengganggu kepentingan nasional negara-negara adidaya tertentu.

Oleh karena itu, Indonesia tidak akan dibiarkan tumbuh dan berkembang menjadi negara besar dan kuat atas dasar potensi bangsa yang berasal dari sumberdaya alamnya yang melimpah, tidak akan dibiarkan tumbuh dan berkembang menjadi negara besar dan kuat atas dasar potensi bangsa yang berasal dari jumlah penduduk yang besar, dan tidak akan dibiarkan tumbuh dan berkembang menjadi negara besar dan kuat atas dasar potensi bangsa yang berasal dari keaneka ragaman budaya yang mempunyai nilai luhur budaya berdasarkan agama. Oleh karena itu, negara-negara tertentu melakukan berbagai cara agar Indonesia tetap dapat dikendalikan, tetap tidak

mempunyai peluang untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk tumbuh dan berkembang sebagai negara besar dan kuat di dunia.

Karena Indonesia adalah negara yang terbentuk bangsanya terlebih dahulu, baru negaranya, maka bangsa adalah titik sentral (center of gravity) yang harus dihancurkan dan dikuasai dengan cara menghancurkan filosofi bangsa yaitu Pancasila.

b. SEJARAH PERJALANAN BANGSA

Sejak runtuhnya kerajaan Majapahit dan masuknya era penjajahan oleh bangsa Belanda, maka seluruh aspek kehidupan bangsa yang bernaung dibawah Kerajaan dan Kesultanan yang tersebar di seluruh Nusantara secara perlahan tapi pasti telah dikuasai oleh bangsa Belanda.

Bangsa Besar yang kodratnya adalah bangsa 'lautan/bahari', secara pelahan dan pasti oleh penjajah telah 'diubah' kodratnya menjadi bangsa 'daratan/agraris'. Dengan politik 'devide et impera', bangsa Belanda dengan mudah menaklukan dan menguasai hampir semua Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dan dikendalikan sesuai dengan kepentingannya, dan mulailah era penjajahan/penindasan yang melahirkan berbagai kesengsaraan rakyat Nusantara. Situasi dan kondisi tersebut diatas, telah membangkitkan dan mendorong semangat para pemimpin kelompok anak bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap perlakuan tidak adil yang diterima. Dengan kesadaran tinggi mereka bangkit dan berupaya melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Hal tersebut tercermin dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh agama seperti Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Pangeran Diponegoro, Pattimura, Sultan Hasanuddin dan lain lain. Gerakan perlawanan tersebut tidak pernah berhasil karena masih dilakukan secara terpisah-pisah, dan dengan mudah dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Namun demikian tidak pernah mematahkan semangat anak bangsa, terbukti dengan perlawanan berikutnya yang dilakukan oleh kalangan cendikia, dengan mengadakan gerakan kemerdekaan dan membentuk organisasi pergerakan pada tanggal 20 Mei 1908

dengan nama " Boedi Oetomo". Langkah yang dilakukan, melalui gerakan pendidikan dengan tujuan membangun kesadaran anak bangsa akan pentingnya kemerdekaan dan hanya bisa diraih dengan penguasaan ilmu pengetahuan diberbagai bidang.

Besarnya keinginan untuk melepaskan diri dari penindasan, dan kehausan akan kemerdekaan, melahirkan semangat kebangsaan dan rasa patriotisme yang tinggi, khususnya para pemuda dan pemudi Indonesia yang akhirnya bermuara pada tekad pengambilan keputusan yang sangat strategis, yaitu keputusan untuk berikrar mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, ikrar tersebut dikenal sebagai Sumpah Pemoeda, yaitu :

" Kami poetra-poetri Indonesia, mengaku bertanah air satu : Tanah air Indonesia ; mengaku berbangsa satu : Bangsa Indonesia ; mengaku berbahasa satu : Bahasa Indonesia". Jakarta 28 Oktober 1928

Pada akhirnya, pemikiran tentang kemerdekaan, tentang upaya melepaskan diri dari penjajahan, meluas keseluruh komponen anak bangsa dan menggugah seluruh anak bangsa untuk bersatu dan berjuang membebaskan diri penjajahan. Dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, maka Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, menciptakan peluang emas yang dimanfaatkan secara baik dan berani oleh para pejuang kemerdekaan, untuk menyatakan kemerdekaan bangsa. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya, rakyat Indonesia mempersenjatai diri untuk melakukan perlawanan kepada Belanda dan sejak saat itu, mulailah terbentuk gerakan mempertahankan kemerdekaan yang lebih terorganisir dengan lebih baik dan rapi diantaranya, seperti laskar Hisbullah, Tentara Keamanan Rakyat dan lain-lain, yang merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia.

Gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan, baik yang dilakukan oleh para tokoh agama, kelompok cendikia dan Tentara Rakyat tidak terlepas dari dukungan para Sultan dan Raja yang telah mangambil sikap,

meleburkan wilayah kerajaan dan kesultanannya, menjadi satu wilayah yang besar Nusantara, semata-mata dalam upaya mewujudkan cita-cita untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, sejahtera, adil dan makmur dalam satu wadah yaitu : Negara Kesatuan Kebangsaan, Negara Kekeluargaan yang berbentuk Republik.

Pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh, disampaikan oleh Bung Karno dalam suatu upacara sederhana disebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dalam pidatonya yang singkat, atas nama bangsa Indonesia bung Karno membacakan teks Proklamasi yang isinya menyatakan bahwa :

"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dll, diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Jakarta 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.

c. AZAS BANGSA

Adat istiadat, kebiasaan dan tata laku bangsa Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan agama, bangsa yang percaya adanya kekuatan besar dijagat raya, kekuatan yang mengatur kehidupan ini. Dengan demikian norma kehidupan yang dipegangnya adalah berkeadilan dan berkeadaban, sehingga kaidah kehidupannya selalu menjaga tali silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan, dengan filosofi menjalin kehidupannya mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan segala persoalan, yang akan menghasilkan keadilan atas dasar kebenaran berazaskan Pancasila, bukan berazaskan demokrasi. (lihat Lampiran 1 dan 2).

Azas bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjalanan bangsa menuju kemerdekaannya, oleh sebab itu para tokoh bangsa Indonesia bersepakat menetapkan bahwa azas bangsa Indonesia harus berdasarkan sejarah perjalanan bangsa, sejarah budaya, adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang ada di bumi Nusantara.

Oleh karena itu, kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah :

1) Kemerdekaan yang berdasarkan pada nilai-nilai ke-Tuhan-an,
2) Kemerdekaan yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab,
3) Kemerdekaan yang berdasarkan pada persatuan dan kesatuan,
4) Kemerdekaan yang berdasarkan pada budaya bangsa yang selalu bermusyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan
5) Kemerdekaan yang berdasarkan pada tujuan untuk meraih Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Azas bangsa Indonesia tersebut harus tertanam dan menancap di setiap relung jiwa anak bangsa dan dilangkahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rumah besar Indonesia. Anak bangsa yang tinggal dirumah besar Indonesia adalah bersaudara, diharapkan harus saling menyayangi satu sama lain dan setiap anak bangsa berkewajiban untuk menjadi yang terbaik dan berbuat baik bagi keluarga, lingkungan dan negaranya.

d. SIFAT BANGSA

Sejak dahulu kala, masyarakat yang tinggal menetap dan beranak pinak diwilayah Nusantara yang kemudian menyebut dirinya sebagai bangsa Indonesia adalah masyarakat yang percaya akan adanya kekuatan besar yang menguasai dunia ini, yang mengatur, menjalankan dan mengendalika seluruh sendi kehidupan dialam semesta. Dengan demikian sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang menguasai alam semesta ini. Pada sisi lain dalam praktek kehidupan sehari-hari, adat istiadat, kebiasaan, tata laku kehidupan masyarakat dijalankan selalu berpegang pada etika dan norma yang berkeadilan dan berkeadaban, menjalin tali silaturahmi, saling tolong menolong, selalu bergotong royong, dan bermusyawarah dalam memecahkan setiap persoalan, sehingga kehidupan yang harmonis dalam masyarakat selalu terjaga dan terpelihara dengan baik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga persatuan kesatuan.

e. JATIDIRI BANGSA

Fakta sejarah perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang kemudian menjadi dasar kemerdekaan Bangsa Indonesia, pada dasarnya merupakan sifat dasar Bangsa Indonesia. Oleh karena itu adalah menjadi hal yang wajar apabila unsur-unsur dasar sejarah perjuangan, dengan diperkaya oleh nilai-nilai luhur dan budaya daerah yang beraneka ragam serta sifat Bangsa yang tinggal di Nusantara menjadi Jatidirinya Bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para 'Pelopor Bangsa' sebagai pegangan dan sekaligus koridor dalam penyelenggaraan sistim kehidupan berbangsa dan bernegara.Pegangan dan koridor tersebut harus dipegang teguh oleh semua anak bangsa karena akan menghantar pencapaian cita-cita bangsa dalam meraih kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat,bermartabat, sejahtera, adil dan makmur.

2. PEMANGKU AMANAH BANGSA.

Pancasila adalah kebenaran bagi bangsa Indonesia karena Pancasila adalah lintasan sejarah perjalanan perjuangan bangsa, budaya, sifat dan jatidiri yang menjadi azas bangsa Indonesia yang mengacu pada kebenaran agama-agama yang ada di Indonesia. Pancasila menganut sistim majelis, maka lembaga Kedaulatan Bangsa Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Majelis Persatuan Indonesia, Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Majelis Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Majelis-majelis tersebut diisi oleh wakil-wakil rakyat dari masing-masing wilayah dan mereka adalah penduduk yang tinggal menetap di wilayah yang diwakili.

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaanya, memberikan bukti tentang keterlibatan kaum Agamawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda, seperti perang Padri, perang Diponegoro, perang Maluku dan sebagainya. Kemudian kaum Cendikiawan melakukan perlawanan dengan cara meningkatan pendidikan terhadap anak bangsa. Keterlibatan dan peran Tentara Keamanan Rakyat dimana rakyat

dengan penuh kesadaran mengangkat senjata terhadap Belanda, dikemudian hari tentara rakyat ini menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya peran penting Para Raja, Para Sultan dan Pemangku Adat yang menggunakan kekayaan dan kemampuan yang dimiliki untuk membantu perjuangan. Keterlibatan mereka adalah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri dan sebenarnya mereka adalah Pewaris Pemangku Amanah Bangsa yang sah dan berhak duduk sebagai wakil rakyat dari daerahnya masing-masing yang kemudian disebut sebagai Majelis-Majelis Bangsa

3. PANCASILA SEBAGAI TATA (SISTIM) BERBANGSA

a. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Tata (sistim) berbangsa Pancasila menetapkan para pemangku amanah bangsa sebagai wakil rakyat yang duduk di Lembaga Bangsa yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat, bertanggung jawab merumuskan Garis Besar Haluan Negara dan undang-undang. Pancasila telah menetapkan majelis-majelis berdasarkan sila-sila Pancasila, yaitu : Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Kemanusiaan yang adil dan beradab, Majelis Persatuan Indonesia, Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Majellis Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (lihat Skema Tata Berbangsa dan Bernegara Pancasila).

Majelis-Majelis Bangsa mewakili daerahnya duduk di Lembaga Bangsa yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat bertanggung jawab mengolah dan mengelola dengan arif dan bijaksana semua persoalan berdasarkan potensi bangsa dan negeri. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat merumuskan dan menetapan kebijakan Undang-Undang Dasar, Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR yang terkait untuk pencapaian Tujuan Berbangsa dan Bernegara, dengan uraian sebagai berikut :

1) Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa

Majelis KeTuhanan Yang Maha Esa terdiri dari pemuka agama yang resmi diiakui secara sah oleh Negara yang datang sebagai perwakilan dari wilayah masing-masing, yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang, dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :

a) Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa menetapkan bahwa bangsa Indonesia harus ber-Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar agama.

c) Negara Indonesia adalah Negara Beragama, bukan Negara Agama

d) Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab

e) Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar Persatuan Indonesia

f) Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

f) Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

g) Seluruh Rakyat Indonesia harus beragama, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang.

h) Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa menetapkan agama-agama yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan musyawarah mufakat, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang

2) Majelis Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Majelis Kemanusiaan yang adil dan beradab terdiri dari para Cerdik Cendekia yang datang sebagai perwakilan dari wilayah masing-masing, yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang, dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :

a) Majelis Kemanusiaan yang adil dan beradab menetapkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab.
b) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kemanusiaan adil dan beradab.
c) Kemanusiaan yang adil dan beradab atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
d) Kemanusiaan yang adil dan beradab atas dasar Persatuan Indonesia.
e) Kemanusiaan yang adil dan beradab atas dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
f) Kemanusiaan yang adil dan beradab atas dasar Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
g) Seluruh warga Negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang.
f) Majelis Kemanusiaan yang adil dan beradab menetapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atas dasar musyawarah mufakat, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.

3) Majelis Persatuan Indonesia.

Majelis Persatuan Indonesia terdiri dari wakil-wakil baik dari militer aktif atau pensiunan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Angkatan Laut, Tentara Nasional Angkatan Udara dan Kekuatan Cadangan yang mengetahui, mengerti, dan memahami tentang pertahanan Negara, dipilih dan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang, dengan kaidah-kaidah sebagai berikut

a) Majelis Persatuan Indonesia menetapkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa persatuan Kebangsaan.
b) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara persatuan kebangsaan.
c) Persatuan Indonesia atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

d) Persatuan Indonesia atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
e) Persatuan Indonesia atas dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
f) Persatuan Indonesia atas dasar Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
g) Majelis Persatuan Indonesia menetapkan wilayah kedaulatan bangsa dan negara, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang.
h) Setiap warga Negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam membela persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang.
i) Majelis Persatuan Indonesia dalam hal memutuskan dan menetapkan atas dasar musyawarah mufakat di seluruh Indonesia.

4) Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan terdiri dari para Raja/Sultan dan atau Pemangku Adat, sebagai perwakilan dari masing-masing wilayah dari seluruh wilayah Indonesia, dipilih dan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang, dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :

a) Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menetapkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

b) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

c) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

e) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atas dasar Persatuan Indonesia.

f) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atas dasar Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

g) Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam menetapkan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang.

h) Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menetapkan dan memutuskan atas dasar musyawarah mufakat di seluruh Indonesia .

5) Majelis Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia.

Majelis Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia terdiri dari para perwakilan organisasi profesi dari masing-masing wilayah dari seluruh Indonesia, dipilih dan ditetapkan bedasarkan musyawarah mufakat, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang dengan kaidahkaidah sebagai berikut :

a) Majelis Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia menetapkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

b) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berkeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

c) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

d) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.

e) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia atas dasar Persatuan Indonesia.

f) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia atas dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

g) Majelis Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia menetapkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

h) Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

i) Majelis Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia menetapkan dan memutuskan atas dasar musyawarah mufakat diseluruh wilayah Indonesia.

b. Majelis Dewan Perwakilan Rakyat

1) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat keanggotaannya terdiri dari para pakar yang datang dari wilayah, dipilih dan ditetapkan oleh para Pemangku Amanah Bangsa, yang selanjutnya akan diatur dalam Undang-Undang. Kriteria persyaratan disesuaikan oleh tuntutan kebutuhan bangsa.

2) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat adalah Badan Pekerja Lembaga Bangsa/MPR yang bertugas merumuskan dan menjabarkan keputusan yang dihasilkan oleh Lembaga Bangsa kedalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan aturan-aturan pelaksanaannya. Majelis Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari :

a) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat bidang Ketuhanan Yang Maha Esa.

b) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat bidang Kemanusiaanyang adil dan beradab.

c) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat bidang PersatuanIndonesia

d) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat bidang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

e) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat bidang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjabarkan, merumuskan dan menyiapkan rancangan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam tata berbangsa dan bernegara, membawahi majelis-majelis pekerja yang dibentuk secara khusus sesuai tuntutan kebutuhan, diantaranya : Majelis Agama, Majelis Pendidikan, Majelis Pertahanan-Keamanan,dan majelis-majelis lain sesuai dengan tuntutan kebutuhan tata bernegara.

4. PANCASILA SEBAGAI TATA (SISTIM) BERNEGARA

Pancasila dalam tata bernegara menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Bangsa menetapkan dan mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Negara, Undang-Undang Dasar dan aturan-aturan pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Presiden dan para pembantunya.

a. PRESIDEN

Presiden adalah mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan musyawarah-mufakat oleh para pemangku amanah bangsa untuk melaksanakan Undang-undang Dasar dan Garis garis Besar Haluan Negara, bertanggung jawab kepada Majelis atas pelaksanaan tugasnya. Presiden dibantu oleh Menteri yang memimpin Departemen sebagai badan pelaksana teknis.

b. KABINET

Para pembantu Presiden dipilih dan ditunjuk berdasarkan kriteria yang telah diitentukan, ditetapkan, diangkat dan dberhentikan oleh Presiden.

Keseluruhan penjelasan diatas didasari oleh uraian dan analisis pada Bab III dan IV, dan harus didukung dengan “penyempurnaan” beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (asli), yang diantaranya kami kemukakan pada Bab V.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. SUMPAH PEMUDA

Keinginan segera terbebas dari penindasan penjajah dan merdeka, telah melahirkan semangat persatuan dan keberanian pada setiap diri anak bangsa untuk mengambil keputusan besar, penuh risiko dan sangat strategis, yang disampaikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Keputusan itu merupakan titik puncak keberanian dan wujud kebulatan tekad anak bangsa dengan segala risiko yang akan diterima, menyatakan Ikrar sebagai satu Bangsa, satu Negara dan satu Bahasa, yang diwujudkan dalam 'Soempah Pemoeda', yang berbunyi :

Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia.

Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia.

2. PROKLAMASI

Perjuangan panjang untuk merdeka dengan segala pengorbanan yang harus diberikan, akhirnya membuahkan hasil seperti yang diimpikan. Bangsa Indonesia akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia, dan Bung Karno atas nama Bangsa Indonesia membacakan teks 'Proklamasi' tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Adapun bunyi teks proklamasi adalah sebagai berikut :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia, dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain lain, akan diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta 17-8-45
Atas nama Bangsa Indonesia

Soekarno – Hatta

3. DASAR KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA

Kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah kemerdekaan hasil perjuangan panjang anak bangsa dengan pengorbanan jiwa dan harta yang dimiliki dan bukan kemerdekaan hasil pemberian atau hadiah dari penjajah. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur yang menjadi 'ruh' perjuangan bangsa Indonesia adalah nilai-nilai luhur yang telah ada dan melekat disetiap anak bangsa yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara, dan selanjutnya dipakai sebagai dasar/landasan kemerdekaan, yaitu :

a. Kemerdekaan Bangsa yang berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
b. Kemerdekaan Bangsa yang berdasakan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
c. Kemerdekaan Bangsa yang berdasarkan Persatuan Indonesia
d. Kemerdekaan Bangsa yang berdasarkan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
e. Kemerdekaan Bangsa yang bertujuan tegaknya Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

4. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan demikian sejak saat itu Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang merdeka dan berdaulat, sejajar dengan negara-negara lain. Kemudian secara resmi Bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya " Negara Kesatuan Kebangsaan yang berbentuk Republik ", pada tanggal 18 Agustus 1945, seperti yang tercantum dalam 'Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

> Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan .
>
> Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
>
> Atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
>
> Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang ber-Kedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia".

Pembukaan tersebut disamping menegaskan tentang berdirinya Negara Kesatuan Kebangsaan yang berbentuk Republik, juga menetapkan tujuan abadi yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia yaitu : Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab; Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan; Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mewujudkan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, mewujudkan rakyat yang sejahtera dan cerdas serta ikut dalam menegakkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar yang melandasi kemerdekaan sekaligus menjadi koridor dan regulator dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara

5. IKRAR BANGSA INDONESIA

Letak geografis yang terletak diantara dua samudera dan dua benua, dilewati oleh empat jalur laut utama, dari tujuh jalur laut utama dunia, menjadikan Indonesia sebagai pintu yang sangat strategis dan penting bagi dunia Ditambah dengan sumberdaya alam yang melimpah, keragaman budaya dengan nilai-nilai luhur, serta jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi yang bagus untuk tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan besar yang disegani dan ditakuti dunia.

Potensi bangsa yang besar yang dimiliki bangsa ini adalah karunia yang tiada ternilai dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Bangsa Indonesia, yang diolah dan dikelola dengan baik untuk kemaslahatan umat khususnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang merdeka, religius dan berdaulat serta hidup dan berkehidupan di Negeri ini, adalah suatu kewajiban dan keharusan bagi segenap anak bangsa untuk ber-Ikrar pada negerinya sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Pencipta Alam semesta dan siap berkorban dengan jiwa dan raganya demi mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Ikrarnya sebagai berikut:

"AKU BERSUMPAH DEMI NEGERI INI"

Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Kami Bangsa Indonesia ber-keTuhanan yang Maha Esa.
- Kami Bangsa Indonesia berKemanusiaan yang Adil dan berAdab.
- Kami Bangsa Indonesia menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan Indonesia.
- Kami Bangsa Indonesia berKerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan .
- Kami Bangsa Indonesia berKeadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BAB IV

UNDANG-UNDANG DASAR BANGSA

Adalah fakta sejarah yang tidak dapat ditolak, bahwa Indonesia adalah negara yang terbentuk bangsanya terlebih dahulu baru negaranya. Bangsa yang terbentuk adalah bangsa yang religius, berkeadaban tinggi karena secara alami telah melekat dalam dirinya nilai-nilai dan budaya luhur Nusantara, yang menjadi azas dan sifat Bangsa Indonesia, yaitu :

- Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
- Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan Indonesia
- Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan
- Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

yang merupakan Jatidiri Bangsa Indonesia

Oleh karena itu, jatidiri bangsa Indonesia, yang merupakan juga sebagai tujuan berbangsa, harus menjadi tolok ukur dan menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam sistim kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan tujuan bernegara yang merupakan cita-cita kemerdekaan seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Bangsa.

Atas dasar azas dan sifat yang menjadi jatidiri bangsa, maka Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disiapkan oleh para pendiri republik berlandaskan konsep kekeluargaan, bukan berlandaskan konsep individualis harus bersifat tetap, pasti dan diterima oleh setiap rakyat Indonesia dan dituangkan kedalam pasal-pasal yang setiap pasalnya terkandung nilai-nilai kekeluargaan, sebagai berikut :

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Kebangsaan yang berbentuk REPUBLIK

(2) Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusian yang Adil dan Beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
e. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

(3) Kedaulatan ditangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Kebangsaan yang kemudian disebut sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Majelis Kebangsaan, yang terdiri dari majelis-majelis :

a. Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Majelis Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
c. Majelis Persatuan Indonesia

d. Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
e. Majelis Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

yang anggota-anggota Majelisnya adalah para pemimpin majelis dari setiap propinsi yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.

(2) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan atas dasar Musyawarah-Mufakat dari majelis-majelis seperti tertera dalam pasal 2, ayat 1 diatas.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun di Ibukota Negara.

Pasal 3

(1) Majelis Pemusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar, Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan Ketetapan Majelis

(2) Majelis Permusayawaratan Rakyat menetapkan Majelis Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar Musyawarah-Mufakat yang terdiri dari Majelis-Majelis seperti tertera dalam pasal 2, ayat 1, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih atas dasar Musyawarah-Mufakat dari Majelis-Majelis seperti tertera dalam pasal 2, ayat 1 diatas, yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dasar Musyawarah-Mufakat dari Majelis-Majelis seperti tertera dalam pasal 2, ayat 1, yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 4

Majelis Dewan Perwakilan Rakyat adalah Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri :

1. Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Majelis Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Majelis Persatuan Indonesia,
4. Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
5. Majelis keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

(1) Anggota-anggota Majelis Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari sebagian anggota Majelis-Majelis di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan atau selain anggota Majelis-Majelis di Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan musyawarah-mufakat, dan selanjutnya diatur dalam undang-undang.

(2) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat membuat rancangan Undang-Undang dan peraturan pengganti undang-undang untuk mendukung pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

(3) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat bertugas menjabarkan Garis Besar Haluan Negara kedalam program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

(4) Seluruh hasil kegiatan Majelis Dewan Perwakilan Rakyat dilaporkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk ditetapkan dan diundangkan.

(5) Majelis Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sesuai tuntutan kebutuhan

Pasal 5

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah adalah Majelis Kebangsaan ditingkat daerah yang terdiri :

1. Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Majelis Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Majelis Persatuan Indonesia
4. Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawatan/perwakilan
5. Majelis Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

yang anggota-anggota Majelisnya adalah para pemimpin majelis dari setiap Kabupaten/Kota yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.

(2) Sebagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Daerah, atas dasar musyawarah mufakat ditunjuk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai perwakilan dari Propinsi bersangkutan.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah ditetapkan atas dasar Musyawarah-Mufakat dari majelis-majelis seperti tertera dalam pasal 5, ayat 1 diatas

Pasal 6

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah menyusun rencana, pembangunan daerah berdasarkan potensi dan kepentingan daerah dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan nasional, sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Nasional di Majelis Permusyawaratan Rakyat

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah melaksanakan pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan daerahnya

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah bersidang sedikitnya (2) dua kali dalam satu tahun di Ibukota Propinsi.

BAB V

PENUTUP

Demikian pokok-pokok sistim kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Pancasila diturunkan kedalam tata berbangsa dan tata bernegara, sekaligus sebagai azas, sifat dan jatidiri bangsa yang terlahir dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Uraian tersebut diatas adalah landasan yang bersifat pasti, tetap dan mengikat sebagai penyelamat bangsa yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dan selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam menjabarkan pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, Desember 2015

LAMPIRAN

Lampiran 1

PANCASILA MILIK BANGSA-BANGSA, DEMOKRASI MILIK PARA PENGUASA

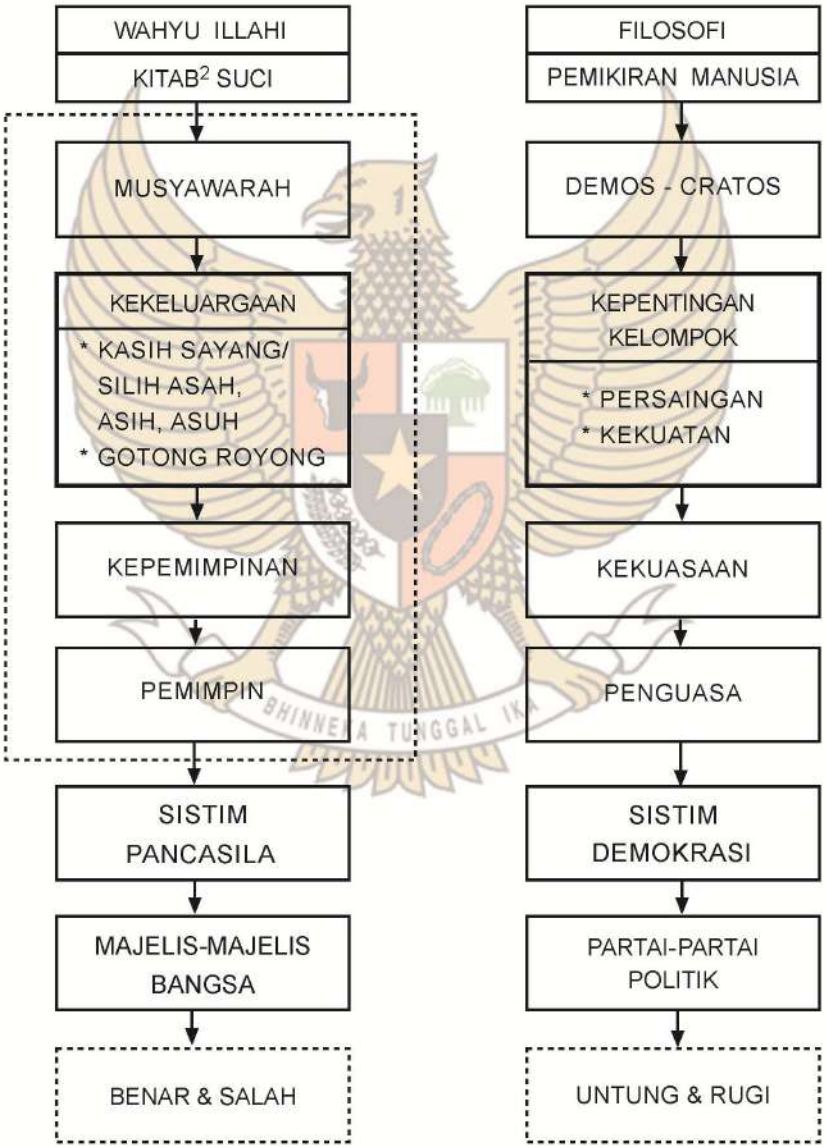

Dari skema ini, jelaslah bahwa sistim Demokrasi sangat berbeda dan bertentangan dengan sistim Pancasila, karena :

Sistim Pancasila tersusun berdasarkan Wahyu Ilahi, yang tertuang dalam Kitab-kitab Suci setiap Agama. Diperintahkan oleh setiap agama untuk ber-musyawarah dalam mencari kebenaran dan kebaikan bagi umat, agama, bangsa dan negara. Yang dilandasi oleh sifat kasih sayang, terwujud pada sikap silih asih, silih asah dan silih asuh dalam membangun jiwa gotong royong bagi masyarakat/bangsa, dan akhirnya akan membentuk sistim kepemimpinan yang akan dijalankan oleh pemimpin bangsa.

Pembentukan Majelis-majelis Bangsa dari daerah sampai ke pusat dengan sendirinya sesuai dengan tuntunan agama-agama yang ada, sebagi wadah dari pemimpin-pemimpin bangsa bermusyawarah untuk mufakat terhadap kebenaran demi kemaslahatan umat, agama, bangsa dan negara yang bermartabat.

Sistim Demokrasi disusun atas dasar tuntutan filosofi Yunani "demos-cratos", dimana kekuasaan ada ditangan rakyat, dan suara terbannyak adalah kekuatan. "Kekuatan Suara" tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang saja yang terhimpun dalam wadah partai politik dalam usahanya menggapai hasrat kekuasaan oleh para penguasa atau calon penguasa yang saling bersaing satu sama lain dengan menghalalkan segala cara, tercermin dalam perilaku iri, dengki, fitnah/hasut bahkan biadab. Dengan demikian sistim demokrasi adalah sistim gaya baru politik adu domba/memecah belah.

Dari gambaran tersebut, menjadi semakin nyata bahwa partai politik berfungsi sebagai wadah kepentingan sekelompok orang yang hanya didasari pada nilai untung-rugi bagi kelompoknya, dan selalu mengatas namakan rakyat, adalah bentuk penjajahan baru yang menghancurkan kedaulatan dan martabat bangsa.

Lampiran 2

PERBEDAAN AZAS PANCASILA DAN AZAS DEMOKRASI

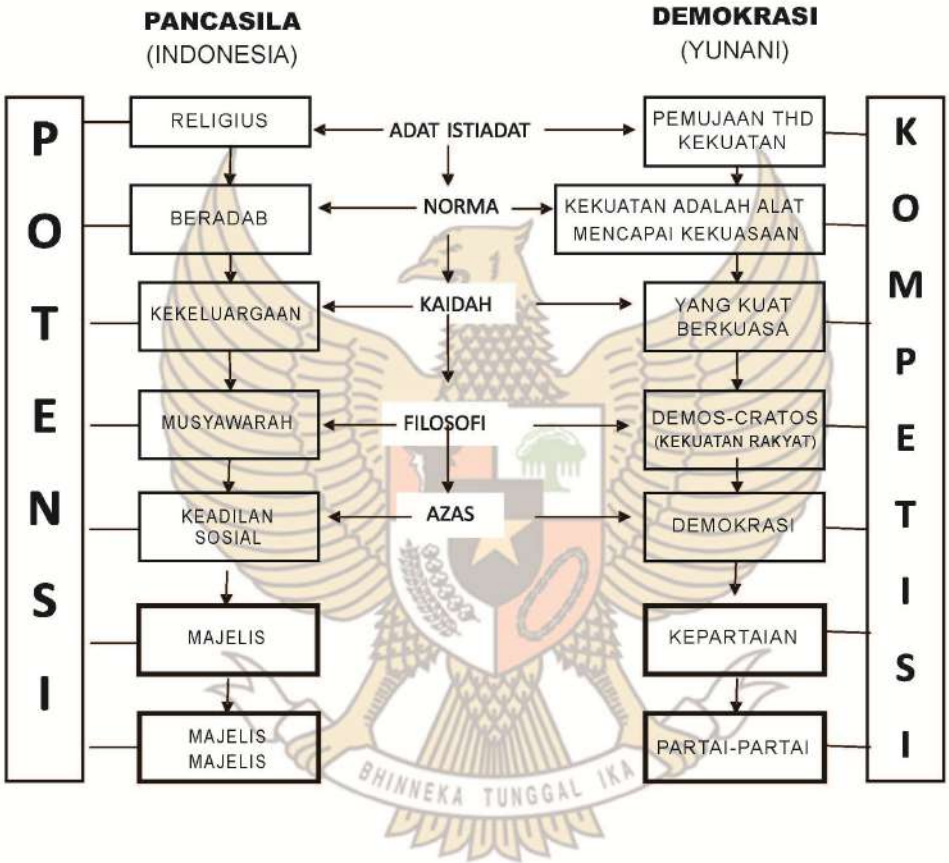

Adat istiadat' bangsa Indonesia yang religius, yang percaya akan adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, melahirkan 'norma' masyarakat yang Beradab, dan menjadikan persatuan/kekeluargaan sebagai 'kaidah', yang mempunyai sistim musyawarah sebagai 'filosofi' dengan ber-'azas'-kan keadilan bagi seluruh elemen masyarakatnya, yang kemudian disebut sebagai PANCASILA, membangun sistim Majelis sebagai wadah menjalankan sistim berbangsa dan bernegara, yang didalamnya terdiri dari majelis-majelis :

1. Majelis KeTuhanan Yang Maha Esa
2. Majelis Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Majelis Persatuan Indonesia
4. Majelis Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Majelis Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,

dimana majelis-majelis ini akan mengelola seluruh 'potensi' yang ada dinegeri ini, sehingga majelis-majelis tersebut, akan sekaligus menjadi 'potensi' dalam membangun tegak dan berdaulatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mampu melindungi seluruh 'potensi' yang ada dinegeri ini, sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Akan tetapi saat ini sedang diterapkan suatu sistim berbangsa dan bernegara yang berasal dari Yunani, yaitu 'adat istiadat' bangsa yang mengagungkan kekuatan, yang melahirkan 'norma' penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan/kekuasaan, sehingga 'kaidah' nya, yang kuat yang berkuasa, dengan 'filosofi' yang dikenal dengan demos-cratos yang dalam penerapannya menjadi 'azas' yang kemudian disebut demokrasi, yang dilaksanakan melalui wadah kepartaian yang didalamnya terdiri dari partai-partai yang :

1. Mengatasnamakan Agama
2. Mengatasnamakan Keadilan
3. Mengatasnamakan Nasional
4. Mengatasnamakan Rakyat
5. Mengatasnamakan Keadilan Sosial

dimana sistim demokrasi, telah membangkitkan "kompetisi" antara "potensi-potensi" yang ada dinegeri ini dibawah kendali pemilik sistim demokrasi itu sendiri, yang berakibat pada hilangnya kedaulatan Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tidak mungkin terwujud, karena dalam penerapannya ternyata azas Demokrasi adalah suatu bentuk penjajahan gaya baru terhadap bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain didunia.

LINTASAN PERJALANAN MENEGAKKAN KEDAULATAN PANCASILA

LINTASAN PERJALANAN
MAJELIS KEBANGSAAN PANJI NUSANTARA
MENGAJAK IKRAR ANAK BANGSA KEPADA NKRI

Berikut adalah gambaran perjalanan panjang Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara dalam upaya mengingatkan, menyadarkan dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan sejarah perjalanan perjuangan bangsa meraih kemerdekaannya kepada anak bangsa. Perjalanan diawali dari diangkatnya IKRAR kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali pada hari Jum'at, jam 14.20, tanggal 17 Desember 2010, di U.C Gajah Mada Yogyakarta hingga kini telah menyinggahi berbagai kota dan daerah, mulai dari ujung timur Papua sampai Banda Aceh di ujung barat P. Sumatra. Lintasan perjalanan ini hanya mencakup sebagian dari keseluruhan perjalanan yang telah dilakukan, untuk memberikan gambaran singkat tentang langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara.

No	TANGGAL		LOKASI/KOTA KELOMPOK MASYARAKAT YANG HADIR PADA PEMAPARAN DAN IKRAR
	Tahun 2010		
1	17 Desember 2010	Yogyakarta, UC - Univ. GajahMada	Silaturahmi Nasional dan Diskusi Publik, dengan pemrakarsa KPH. Wisnu. Ikrar yang pertama, sesudah sholat Jumat
2	29 Desember 2010	Yogyakarta, UC-Univ. Gajah Mada	Refleksi Tutup Tahun 2010, bersama tokoh dan di kediaman Gusti Prabukusumo masyarakat, agama, dan pemuda. Pemrakarsa Hadi Nagoro
	Tahun 2011		
3	20 Januari 2011	Yogyakarta, Pusat Studi Pancasila, UGM	Diskusi dengan tokoh masyarakat
4	23 dan 24 Januari 2011	Surabaya, Pesantren Nurul Islam	Kyai dan Ulama, pemrakarsa Gus Soleh
5	25 Januari 2011	Surabaya, Hotel Paragon	Tokoh masyarakat, pengusaha keturunan, dan pemuda
6	29 Januari 2011	Yogyakarta, Gedung Museum Pangeran Diponegoro	Acara Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, pemrakarsa KPH Wisnu
7	5 Pebruari 2011		Jakarta, Hotel Bidakara Tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan LSM. Merintis pertemuan dengan Keraton-2 Nusantara dengan Raja Denpasar
8	9 Pebruari 2011	Pekanbaru, Univ. Riau Siak	Rektor dan staf pengajar

9	10 Pebruari 2011		Tokoh masyarakat dan keluarga keturunan Sultan Siak
10	13 Pebruari 2011	Bandung, UIN	Dekan, staf pengajar dan mahasiswa
11	14 Pebruari 2011	Cirebon, Kantor PGRI	PGRI Cirebon
12	16 Pebruari 2011	Bandung, Sesko-TNI	Kuliah untuk Sesko-TNI, dengan topik pertahanan negara dikaitkan dengan Pancasila
13	17 Pebruari 2011	Jakarta, Gedung STOVIA	Tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan pergerakan.
14	19 Pebruari 2011	Denpasar, Bali	Silaturahmi Keraton-2 Nusantara, bersama Raja-2 dan Sultan seNusantara. Pemrakarsa Raja Denpasar, Ida Bagus Cokorda Pemecutan
15	22 Pebruari 2011	Sorong, Papua	Tokoh masyarakat Sorong dan sekitarnya
16	25 Pebruari 2011	Malang, di GKI Malang	Tokoh-2 masyarakat, agamawan dan pemuda
17	6 Maret 2011	Serang, Banten	Masyarakat Banten, diselenggarakan oleh Kesultanan Banten
18	11 Maret 2011	Cirebon, Keraton Kasepuhan	Bersama tokoh-2 masyarakat, agama, dan pemuda
19	26 Maret 2011	Pandeglang, Banten	Bersama mahasiswa Banten
20	29 Maret 2011	Cirebon, Hotel Grand Tryas	Tokoh masyarakat Cirebon
21	19 April 2011	Cirebon, Keraton Kasepuhan	Silaturahmi Anak Bangsa, bersama ulama dan tokoh-2 masyarakat.
22	24 April 2011	Sukabumi, Univ. Muhammadiyah	Mahasiswa dan staf pengajar UMMI
23	30 April 2011	Jakarta, Gedung Pola	Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda dan Mahasiswa
24	12 Mei 2011	Jakarta, Kantor Republika	Diskusi dengan Staf Redaksi Koran Republika
25	20 Mei 2011	Jakarta, Tugu proklamasi	Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, bersama Pemuda, Mahasiswa dan Tokoh-2 Masyarakat.
26	24 Mei 2011	Jakarta, TVRI	Wawancara MKPN dengan TVRI, tentang langkah-2 menanamkan kembali Pancasila untuk anak bangsa
27	25 Mei 2011	Jakarta, PBNU	Pertemuan dengan Ketua PBNU dan staf.
28	30 Mei 2011	Bogor, Perguruan Yasmin	Tokoh agama, pemuda dan pergerakan
29	10 Juni 2011	Jakarta, Tugu proklamasi	Pemuda, Mahasiswa dan Tokoh-2 Masyarakat.
30	16 Juni 2011		Jakarta, Tugu proklamasi Pemuda, Mahasiswa dan Tokoh-2 Masyarakat Jawa Barat dan Banten
31	18 Juni 2011	Jakarta, TVRI	Wawancara hidup di TVRI tentang kegiatan MKPN
32	27 Juni 2011	Bandung, Sesko TNI	Sebagai salah satu pembicara , mengingatkan kembali peran TNI dalam menjaga tetap tegaknya Pancasila dan UUD '45
33	8 Juli 2011	Jakarta, Didepan Gedung DPR/MPR	Pemuda dan Mahasiswa
34	11 Juli 2011	Jakarta, Markas Menwa	BEM/ anggota Menwa
35	16 Juli 2011	Jakarta, Bumi Perkemahan Cibubur	Pendidikan Resimen Mahasiswa, bersama anggota baru MenWa Jakarta

36	21 Juli2011	Subang, Gedung KNPI	Tokoh-2 masyarakat
37	25 Juli 2011	Bandung, Hotel Grandia	Mahasiswa Bandung
38	21 Agustus 2011	Serang, Banten	Mahasiswa baru UNTIRTA
39	8 September 2011	Jakarta, USAKTI Cawang	Mahasiswa USAKTI kampus Cawang
40	10 September 2011	Jakarta	Partisan
41	15 Oktober 2011	Jakarta, Kampus STAN	Mahasiswa STAN
42	16 Oktober 2011	Jakarta, HMI	Anggota HMI
43	20 Oktober 2011	Bandung, Mess Martadinata	Tokoh-2 masyarakat dan kelompok Kabuyutan
44	26 dan 28 Oktober 2011	Jakarta, Gedung Pola dan Tugu Proklamasi	BEM Nusantara dalam Kongres, dan sebagai IRUP pada upacara peringatan Sumpah Pemuda
45	30 Nopember 2011	Cirebon, Buntet Pesantren	Para ulama dan kyai pasantren Buntet, tentang kegiatan MKPN
46	1 Desember 2011	Cipasung	Para Kyai dan Ulama Pesantren Cipasung
47	6 Desember 2011	Serang, Banten, Univ. Sultan Tirtayasa	Pemberian materi sejarah bangsa dan Pancasila pada Seminar Kebangsaan di UNTIRTA
48	14 Desember 2011	Kediri, Lirboyo	Para Kyai dan santri pesantren Lirboyo
49	16 Desember 2011	Serang, Banten	BEM se Banten
50	19 Desember 2011	Cirebon, Keraton Kasepuhan	Silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara
51	20 Desember 2011	Cirebon, Buntet Pesantren	Ulama Buntet, Raja-2 dan Sultan Nusantara.
52	23 Desember 2011	Semarang	Serikat Pekerja PLN
	Tahun 2012		
53	7 Januari 2012	Madura, Sumenep	Tokoh masyarakat Madura, agama, pemuda dan kelompok pergerakan
54	10 Januari 2012	Jayapura, Genyem, Distrik Nimboran, Sentani	Pimpinan OPM, Alex Mebri, Ketua suku Jefry, dan tokoh masyarakat Jayapura
55	11 Januari 2012	Makassar	dengan Raja-2, Pemuka Adat dan mahasiswa.
56	16 Januari 2012	Banda Aceh	Staf Pengajar dan Mahasiswa Univ. Syah Kuala. Pertemuan dengan Bapak Walid Silmune, Pimpinan Pondok Pesantren Silmune
57	17 Januari 2012	Banda Aceh	Siswa siswi SMA 4
58	25 Januari 2012	Denpasar	Pertemuan dan Diskusi dengan Raja Denpasar, Ida Bagus Tjokorda Pemecutan
59	26 Januari 2012	Klungkung, BALI, Puri Klungkung	Pertemuan dan Diskusi dengan Raja Klungkung
60	29 Januari 2012	Ubud, BALI	Pertemuan dan Diskusi dengan Raja-Raja Bali di Puri Ubud
61	2 Pebruari 2012	Banda Aceh	Menghadiri Haul Pendiri Pesantren Silmune
62	12 Pebruari 2012	Sukabumi	Pertemuan dengan Kyai Jejen , Selabintana
63	15 Pebruari 2012	Klari, Karawang, Pesantren Ar-Rohman	Para Ulama se-Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah, di Pesantren Ar-Rohmah pimpinan Kyai Alwi
64	19 Pebruari 2012	Pekanbaru	Mahasiswa Riau
65	25 Pebruari 2012	Cirebon	Bersama Para Kyai dan Ulama se Cirebon
66	26 Pebruari 2012	Cirebon, Stadion BIMA	Anggota Perguruan Merpati Putih, pada acara Kenaikan Tingkat Murid
67	24 Maret 2012	Batam, Kompleks Asrama Haji	Beberapa Perguruan Tinggi dan Masyarakat Batam
68	12 April 2012	Medan, Kompleks Asrama Haji	BEM beberapa Perguruan Tinggi
69	27 April 2012	Bandung, Balai Kota	Musyawarah Nasional ke XIII, Mahasiswa Pancasila
70	7 Juni 2012	Bandung, Sabuga	Silaturahmi Majelis Penegak Pancasila
71	25 Juni 2012	Bandung, Lapangan Gasibu	Apel Siaga- Majelis Penegak Pancasila

72	5 Juli 2012	Surabaya, UNTAG	Pembicara pada Seminar Kebangsaan bersama Bp. Siswono Yudohusoda dan Wakil dari MPR, Bp. Lukman
73	7 Juli 2012	Jakarta, Tugu Proklamasi	Apel Waspada-Majelis Penegak Pancasila
74	11 September 2012	Sukabumi, UMMI	Pembekalan dan Ikrar dengan mahasiswa baru.
75	17 September 2012	Cirebon, Kempek	Menghadiri MUNAS NU
76	18 September 2012	Batam, Kompleks Asrama Haji	Tokoh Pemuda dan Agama
77	21 September 2012	Denpasar	Pertemuan dengan Raja Denpasar IX, untuk rencana pernyataan Raja tentang Pancasila
78	1 Oktober 2012	Cirebon	Persatuan Guru Republik Indonesia
79	20 Oktober 2012	Bandung, Univ. Ahmad Yani	Mahasiswa UnJani
80	17 Nopember 2012	Cirebon, Univ. 17 Agustus 1945	Mahasiswa
81	12 Desember 2012		Jombang, Kantor PemKa Tokoh Pemerintahan dan Masyarakat
82	14 Desember 2012 Tahun 2013	Yogyakarta, UGM	Pembicara pada acara DIES NATALIS UGM
83	4 Januari 2013	Jakarta, Lemhanas	Pertemuan dengan Gubernur Lemhanas
84	12 - 13 Januari 2013		Jakarta, Asrama Haji Rapat Koordinasi MKPN, tokoh masyarakat, agama, pemuda dan mahasiswa perwakilan dari daerah2
85	4 - 5 Pebruari 2013	Jakarta, Desa Wisata TMII	Rapat Koordinasi MKPN, tokoh masyarakat, raja dan sultan, tokoh agama, pemuda dan mahasiswa perwakilan dari daerah2.
86	12 Pebruari 2013		Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara
87	20 Pebruari 2013	Ambon, Univ.Islam Negeri Ambon	Pertemuan Mahasiswa se Ambon
88	21 Pebruari 2013	Makassar, Univ.Muslim Makassar	Pertemuan Mahasiswa Makassar
89	4 Maret 2013	Medan, Univ. Islam Sumut	Pertemuan Mahasiswa Medan
90	6 Maret 2013	Yogyakarta, Univ. Islam Sunan Kalijogo	Pertemuan Mahasiswa Yogyakarta
91	15 Maret 2013	Denpasar, Hotel INNA	Pembicara pada Pertemuan Silaturahmi Raja dan Sultan
92	4 April 2013	Yogyakarta, kantor PLN	Serikat Pekerja PLN se-Indonesia
93	12 April 2013	Jakarta	Audiensi dengan KASAL.Pembicaraan tentang PANCASILA, dan mengingatkan akan peran TNI sebagai Pengawal dan Penegak Pancasila, sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
94	15 April 2013	Jakarta	Audiensi dengan Panglima TNI. Pembicaraan tentang PANCASILA, dan mengingatkan akan peran TNI sebagai Pengawal dan Penegak Pancasila, sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
95	2 Mei 2013	Situbondo	Turut serta dalam LATGAB TNI, bersama WAPRES di KRI Makassar. Kepada Para PATI TNI dan Mantan Kepala Staf Angkatan disampaikan bahwa TNI adalah Pengawal dan Penegak Pancasila, sesuai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
96	13 Juni 2013	Jakarta, Kantor PGI	Dengan Pdt. Andreas Yewangoe, Ketua Umum PGI.Meyimpulkan bahwa Pancasila harus tegak dan berdaulat di Nusantara

97	26 Juli 2013	Gd. Graha Bethel Pulo Mas, Jakarta	Pertemuan dengan kelompok cendekia kristen PIKI (Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia)
98	31 Juli 2013	Jakarta	Pertemuan dan pembacaan Ikrar dengan Pemuda Pusaka Nusantara, Kumpulan BEM Nusantara yang netral. Dibuka oleh Bp. Bursa Sarnubi
99	21 September 2013	Sukabumi	Ceramah dan Ikrar Kebangsaan di UMMI
100	17 Oktober 2013	Jakarta	Diskusi Hukum dengan pakar hukum Sidharta SH dan tim tentang arbitrase internasional
101	9 Nopember 2013	Gd. Nasional, Medan	Ceramah kebangsaan, dalam rangka ULTAH Laskar Arief Rahman, dilanjutkan dengan Ikrar Kebangsaan
102	19 Nopember 2013	Univ.Sebelas Maret, SOLO	Ceramah Kebangsaan, di Ikuti para Guru besar, Dekan, mahasiswa program S-2 dan mahasiswa umum, diteruskan dengan Ikrar Kebangsaan.
103	27 Nopember 2013	Kesatrian Marinir Cilandak KKO, Jakarta	Ceramah Kebangsaan untuk Menwa Jayakarta, dilanjutkan dengan Ikrar Kebangsaan
104	14 Desember 2013	Univ. Hasanuddin, Makassar	Sebagai Pemateri tentang Kebangsaan
105	18 Desember 2013	KOREM WIRABIMA, Pakanbaru, Riau	Cermah Kebangsaan, audiensi dengan Dan Korem Brigjen. Agus dan Plh. Gubernur Riau. Dilanjutkan dengan Ikrar Kebangsaan
106	31 Desember 2013	Jakarta	Terima tamu dari yayasan Al Janah dipimpin oleh MayJen TNI Bambang Saiful Basri
	Tahun 2014		
107	5 Januari 2014	Legok, Banten	Ceramah Kebangsaan untuk PPM pimpinan H. Syarif, dilanjutkan dengan Ikrar Kebangsaan Ceramah Kebangsan dan Ikrar dalam DIALOG NASIONAL Kel. Besar ANGKATAN 66. Dihadiri Bp. Ryamirzad Ryakudu dan Bp. Akbar Tanjung
108	9 Januari 2014	Lapangan Walikota TangSel, Pamulang, TangSel	Deklarasi dan Ikrar Kebangsaan dari warga Nasrani TangSel dan masyarakat
109	19 Januari 2014		
110	25 Januari 2014	Singaraja, BALI	Deklarasi dan Ikrar kebangsaan para tokoh agama dan masyarakat Singaraja
111	15 Pebruari 2014	Lapangan Gedung DPRD BATAM	Apel Kebangsaan, Deklarasi dan Ikrar Kebangsaan diikuti oleh tokoh agama, masyarakat, mahasiswa, pemuda dan Pramuka
112	23 Pebruari 2014	GOR Juwana, Denpasar, BALI	Apel Kebangsaan, Deklarasi dan Ikrar Kebangsaan diikuti oleh tokoh agama, masyarakat, mahasiswa dan pemuda
113	27 Pebruari 2014	Pesantren Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur	Sebagai Pembicara tentang Kebangsaan, bersama Gus Nuril Arifin
114	14 Maret 2014	Didepan Gedung Merdeka, Bandung	Apel Kebangsaan, Deklarasi dan Ikrar Kebangsaan dengan tokok agama, masyarakat, pemuda dan mahasiswa, PPM, masyarakat Pantura

BHINNEKA TUNGGAL IKA

BHINNEKA TUNGGAL IKA

MAJELIS KEBANGSAAN
PANCASILA JIWA NUSANTARA

PANCASILA CENTER